

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak reformasi bergulir perkembangan demokrasi dalam praktek aplikasinya secara umum mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa. Bahkan negara-negara lainpun melihat Indonesia menjadi Negara demokrasi yang besar. Meskipun terdapat prinsip utama dalam demokrasi namun dalam implementasi demokrasi di masing-masing negara tentunya memiliki spesifikasi yang secara alami berlaku dan lazim dilakukan disuatu negara. Sebagai contoh, di era Soekarno menjadi presiden maka demokrasi dalam tatanan empiris berlaku demokrasi terpimpin. Di era Soeharto demokrasi yang terapkan ketika itu adalah demokrasi-Pancasila yang ada kecenderungan lebih mengarah ke-otoriter, meskipun banyak orang menganulir bahwa demokrasi tertutup/tidak berjalan di era orde baru tersebut (Gafar, 1999).

Demokrasi merupakan sebuah proses perkembangan kehidupan politik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor ekonomi, sosial, budaya, maupun faktor eksternal yang didukung oleh perkembangan teknologi informasi. Heru Nugroho dalam Pengantar Publikasi Versi Indonesia tentang Demokrasi dan Demokratisasi mengatakan bahwa abad ke-21 merupakan “musim semi demokrasi”, baik yang berlangsung di Negara-negara penganut paham sosialisme, maupun Negara-negara berkembang menuju masyarakat industri (Sorensen, 2003).

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah. Menurut Hennry B. Mayo (2009), sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Dalam kaitan ini John Schwarmantel (dalam Adisusilo, 2008) menyebutkan adanya tiga ciri utamasebuah negara yang demokratis, yaitu adanya jaminan: 1. *Participation* adalah negara menjamin setiap warga negara untuk ikut serta dalam mengelola negara, hal ini untuk mencegah negara dimonopoli oleh segelintir orang atau partai, atau kelompok mayoritas tertentu; 2. *Equality* adalah negara menjamin perlakuan yang sama bagi setiap warga negara, hal ini berlaku untuk individu, kelompok tertentu atau golongan manapun dalam negara, sehingga tidak terjadi diskriminasi; 3. *Accuntability* adalah pemerintah wajib memberipertanggungjawaban terhadap rakyatnya. Untuk yang terakhir ini diperlukan transparansi, keterbukaan sepak terjang pemerintah terhadap rakyatnya sehingga dapat dikontrol, diawasi oleh rakyat setiap saat dan dengan demikian dapat dihindari segala bentuk penyimpangan, korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.

Wajah nasionalisme yang akan muncul banyak dipengaruhi oleh kinerja pemerintah yang sedang berkuasa dan kondisi rakyat sendiri. Nasionalisme bisa menjelma menjadi konflik, gerakan protes, dan berbagai bentuk penentangan. Faktor pemicu yang paling efektif terhadap perubahan itu adalah munculnya ketidakadilan. Kesadaran akan adanya ketidakadilan ini akan mempengaruhi legitimasi pemerintah yang selanjutnya akan mengubah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Jika pemerintah tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga menimbulkan kesengsaraan rakyat, maka rakyat akan melakukan protes.

Dalam perkembangannya nasionalisme itu tidak lepas dari konteks sejarahnya. Oleh karena itu ingatan kolektif suatu bangsa yang berasal dari ingatan kolektif lokal sangat berperan dalam membentuk nasionalisme. Bagi bangsa Indonesia, nasionalisme yang berkembang mempunyai dua sifat kesamaan, yaitu faktor solidaritas atas persatuan Indonesia yang menjembatani berbagai macam perbedaan daerah dan mempunyai unsur konflik (penentangan) terhadap kelompok-kelompok sosial tertentu yang dirasakan asing dan aneh. Kaum nasionalis menggerakkan kekuatannya terhadap dua hal, yaitu terhadap dominasi kekuasaan kolonial dan terhadap penguasa tradisional yang sangat feodalistis. (Wertheim, 1956).

Nasionalisme tidak bisa dilepaskan dengan demokrasi karena keduanya menunjukkan adanya “benang merah” bahwa nasionalisme dan demokrasi merupakan kristalisasi dan institusionalisasi dari tahap lanjut perkembangan kehidupan manusia dalam bidang intelektual, ekonomi, dan politik.

Jadi, wajah nasionalisme yang akan muncul banyak dipengaruhi oleh kinerja pemerintah yang sedang berkuasa dan kondisi rakyat sendiri. Nasionalisme bisa menjelma menjadi konflik, gerakan protes, dan berbagai bentuk penentangan. Faktor pemicu yang paling efektif terhadap perubahan itu adalah munculnya ketidakadilan. Kesadaran akan adanya ketidakadilan ini akan mempengaruhi legitimasi pemerintah yang selanjutnya akan mengubah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Jika pemerintah tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga menimbulkan kesengsaraan rakyat, maka rakyat akan melakukan protes.

Mengapa sistem demokrasi harus menjaga prinsip-prinsip abstrak sentimen nasionalistis? Setidaknya ada tiga alasan. Pertama, demokrasi kontemporer melibatkan dialog vertikal antara perwakilan dan diwakili. Hal ini memerlukan wakil yang cukup sadar dan mau menerima, keprihatinan dia atau konstituennya, dan yang lebih penting, mewakili untuk menerima perwakilan sebagai salah satu jenis aspirasi mereka. Berbagai identitas nasional membantu memfasilitasi dialog semacam ini (Moore, 1999). Kedua, tidak seperti demokrasi pra-modern yang ada secara eksklusif di negara kota kecil, demokrasi modern sering terlalu besar untuk memungkinkan warga berinteraksi dengan satu wajah lain dengan muka. Anderson (1984) mengatakan bahwa nasionalisme sebagai sebuah ide atas terbentuknya sebuah komunitas. Terbentuknya sebuah komunitas karena setiap anggota dari suatu bangsa, bahkan bangsa yang terkecil sekalipun, tidak mengenal seluruh anggota dari bangsa tersebut.

Dilihat perkembangan dari masa ke masa, sejarah menunjukkan bahwa pemuda dan mahasiswa selalu menjadi bagian dari pilar demokrasi, sebagai pelopor, penggerak, bahkan pengambil keputusan. Hal ini dibuktikan pada era Sumpah Pemuda 1928, pergerakan 1945, angkatan 1966 yang membidani Tritura, Malari 1974, 1978, dan Reformasi 1998. Maka peran mahasiswa sering kali disebut sebagai transformer atau pembawa perubahan atau digelari sebagai "*agent of change*". Namun dengan adanya perkembangan politik yang dilatarbelakangi demokrasi sebagai sistem politik, peran pemuda khususnya mahasiswa mulai dihadapkan pada persimpangan pemikiran dan gerakan, sehingga tujuan untuk membangun perubahan ke situasi yang lebih baik justru yang terjadi sebaliknya. Berbagai aksi demonstrasi yang dianggap suatu bentuk gerakan yang dilakukan mahasiswa akhir-akhir ini sebagai wujud kritik terhadap pemerintahan mulai mengalami kemerosotan kepercayaan dari masyarakat, bahkan aksi demonstrasi seringkali disinyalir sudah dikooptasi oleh kepentingan-kepentingan elit yang berkuasa.

Berhubungan dengan uraian tentang nasionalisme diatas maka peneliti akan melakukan penelitian tentang nasionalisme. Tetapi peneliti menghubungkan nasionalisme dengan sikap terhadap demokrasi. Melihat negara kita negara Indonesia yang bersistem pemerintahan demokrasi. Selain itu penelitian ini merupakan syarat untuk mengambil gelar Srata 1 (S1), peneliti juga tertarik melakukan penelitian pada kalangan mahasiswa terutama di Fakultas Psikologi di UIN SUSKA. Dikarenakan kesamaan latarbelakang almamater, maka hal itulah yang mejadi alasan peneliti melakukan penelitian yang berjudul : ***Hubungan***

Nasionalisme Dengan Sikap Terhadap Demokrasi Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Suska Riau.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah yang terjadi pada pokok kajian dalam penelitian ini yaitu, *“ Apakah ada hubungan Nasionalisme dengan Sikap Terhadap demokrasi pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Uin Suska Riau ”?*

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui hubungan Nasionalisme dengan Sikap Terhadap Demokrasi Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN SUSKA RIAU.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian Waiq Wardhani (2011), yang berjudul Nasionalisme dan Etnisitas Di Eropa *Kontenporer*. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mohd Faiz, dkk (2011) yang berjudul tentang Pengaruh Nasionalisme Melayu Mewarnai Budaya Politik Melayu Dalam UMNO. Hubungan pemahaman bela negara dengan nasionalisme siswa DI SMPN 03 Tambun Selatan Bekasi oleh Rosita, dkk (2013). Penelitian yang dilakukan oleh Angkasa Yudistira (2011) yang berjudul pengaruh pelibatan politik dan sikap tentang demokrasi terhadap toleransi politik mahasiswa Fakultas Psikologi.

Persamaan dari penelitian ini adalah, sama-sama menggunakan variabel nasionalisme. Sedangkan perbedaan terdapat pada subjek penelitian. Akan tetapi pada penelitian yang diteliti oleh Yudistira sama-sama menggunakan variabel sikap terhadap demokrasi.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi berbagai kalangan yang terkait untuk meneliti lebih lanjut mengenai nasionalisme dan sikap terhadap demokrasi pada mahasiswa. Juga memperkaya pengetahuan dan pemahaman mengenai ilmu psikologi politik

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian dapat dijadikan sumber bacaan bagi seluruh Mahasiswa Psikologi. Juga dapat menambah rasa bangga terhadap negeri sendiri. Idealnya sebuah penelitian ilmiah mampu memberikan sumbangan yang bermanfaat terhadap ilmu pengetahuan, khususnya di bidang yang bersangkutan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak terkait untuk menerapkan nasionalisme dan sikap terhadap demokrasi dalam kehidupan masyarakat terutama di kalangan mahasiswa.